UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penjabaran Penguasaan Negara dalam Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kilang Minyak di Indonesia
BUDIONO SUGIHARTO, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PENJABARAN PENGUASAAN NEGARA DALAM INVESTASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KILANG MINYAK DI INDONESIA

INTISARI

Budiono Sugiharto[1], M. Hawin[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perwujudan penguasaan negara atas minyak dan gas bumi (migas) dengan adanya kebijakan investasi swasta dan asing untuk pembangunan dan pengelolaan kilang minyak di Indonesia, serta mengetahui apakah penguasaan negara atas migas dalam pembangunan dan pengelolaan kilang minyak di Indonesia sudah memberikan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pembahasan tentang bentuk perwujudan penguasaan negara atas migas dengan adanya kebijakan investasi swasta dan asing untuk pembangunan dan pengelolaan kilang minyak di Indonesia dilakukan secara sistematis dengan menguji ke lima (5) fungsi penguasaan negara sesuai penafsiran Mahkamah Kostitusi, yaitu fungsi kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Pembahasan tentang kemanfaatan dari penguasaan negara atas migas dilakukan dengan pendekatan *economics analysis of law*.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya investasi swasta dan asing dalam pembangunan dan pengelolaan kilang minyak, tidak mempengaruhi penguasaan negara atas migas dalam fungsinya untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. Investasi swasta dan asing dalam pembangunan kilang minyak akan mengurangi fungsi negara untuk melakukan pengelolaan secara langsung, namun hal itu sudah sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sektor hilir migas, yaitu bahwa negara boleh sekadar menjalankan fungsi pengaturan, sedangkan fungsi pengelolaannya diserahkan kepada pelaku usaha baik BUMN, BUMD, koperasi, maupun swasta berdasarkan prinsip persaingan. Berdasarkan economic analysis of law didapatkan bahwa kemanfaatan sosial (*social benefit*) dari meningkatnya jumlah pembangunan kilang minyak di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkan dari masuknya investasi swasta dan asing dalam pembangunan kilang minyak tersebut, karena itu dapat disimpulkan bahwa penguasaan negara atas minyak dan gas bumi dalam pembangunan dan pengelolaan kilang minyak di Indonesia sudah memberikan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

[1] PT Pertamina (Persero)
[2] Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penjabaran Penguasaan Negara dalam Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kilang Minyak di Indonesia
BUDIONO SUGIHARTO, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ELABORATION OF STATE CONTROL IN THE INVESTMENT FOR CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF OIL REFINERIES IN INDONESIA

ABSTRACT

Budiono Sugiharto[1], M. Hawin[2]

This research objectives are to determine the form of state control over oil and gas (oil and gas) with the presence of private and foreign investment policies for the construction and management of oil refineries in Indonesia, and to find out whether the state control of oil and gas in the construction and management of oil refineries in Indonesia has provided benefits for the greatest prosperity of the people.

The research was conducted using a normative juridical approach. The discussion of the form of state control over oil and gas in the presence of private and foreign investment policies for the construction and management of oil refineries in Indonesia is carried out systematically by examining the five (5) functions of state control in accordance with the interpretation of the Mahkamah Konstitusi, namely policy function (beleid) regulation (regelendaad), administration (bestuursdaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad). The discussion about the benefits of state control over oil and gas is carried out using the economics analysis of law approach.

Based on the research's outcome, with the presence of private and foreign investments in the construction and management of oil refineries, it does not affect the state's control of oil and gas in its function to make policies, regulation, administration, and supervision. Private and foreign investment in the construction of oil refineries will reduce the function of the state to carry out management directly, but this is in accordance with the spirit of the Mahkamah Konstitusi Decision related to the oil and gas downstream sector, namely that the state can only carry out the regulatory function, while the management function is left to good business actors BUMN, BUMD, cooperatives, and private companies based on competition principles. Based on economic analysis of law, it was found that social benefits from the increase in the number of oil refinery developments in the country were higher than the social costs caused by the inclusion of private and foreign investments in the construction of the oil refineries, therefore it can be concluded that State control of oil and gas in the construction and management of oil refineries in Indonesia has provided benefits to the greatest prosperity of the people.

[1] PT Pertamina (Persero)
[2] Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada